



# Pemkot Diminta Tak Tebang Pilih

## Toko Modern Berjejaring Ilegal Harus Ditertibkan

**YOGYA, TRIBUN** - Keberadaan toko modern berjejaring ilegal harus segera ditertibkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta harus bisa mengendalikan jumlah toko modern berjejaring yang terus muncul tiap tahunnya. Hal tersebut disuarakan anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Sasono. "Jangan tebang pilih kalau melakukan penertiban. Ada toko modern berjejaring

yang terbukti tidak ada izinya, langsung tertibkan," tegasnya, Selasa (30/1).

Menurutnya, pemkot telah turun langsung dalam menertibkan cafe yang menjual minuman keras di Prawirotanan. Hal serupa mestinya juga bisa dilakukan untuk toko modern berjejaring ilegal.



**Pemkot harus menjunjung tinggi komitmen ekonomi kerakyatan. Sudah terlalu banyak toko modern di Kota Yogyakarta, ini ditambah lagi yang ilegal makin banyak. Kasihan para pedagang kecil, keberadaannya makin terlupakan.**

● ke halaman 19



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

**SIDAK** - Anggota Forpi Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di sebuah toko modern berjejaring di jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta, Senin (29/1).

## Pemkot Diminta Tak Tebang

● Sambungan Hal 13

"Pemerintah Kota harus menjunjung tinggi komitmen ekonomi kerakyatan. Sudah terlalu banyak toko moderen di Kota Yogyakarta, dan ini ditambah lagi yang ilegal makin banyak. Kasihan para pedagang kecil, toko kelontong, keberadaannya makin terlupakan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi untuk terjun ke lapangan dan melakukan penertiban.

"Ini sedang kami koordinasikan. Dalam waktu dekat, akan kami tertibkan toko-toko moderen berjejer yang tidak memiliki izin," bebarnya.

Nurwidi menjelaskan, dalam Perwal Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Moderen di Kota Yogyakarta, tidak ada poin mengenai sanksi.

Demikian juga dengan Izin Usaha Toko Moderen (IUTM) yang merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak tertera sanksi baik pidana maupun sanksi administratif. "Sanksi termuat dalam Undang-Undang atau Perda," tandasnya.

**Harus Ikuti Aturan**  
Terpisah, Wakil Wali Kota

Yogyakarta, Heroe Poerwadi menegaskan, siapapun yang melanggar peraturan akan ditertibkan, khususnya tentang toko moderen berjejer yang sudah jelas-jelas menyalahi Perwal.

"Toko moderen berjejer yang tidak berizin jangan buka dulu. Kebanyakan mereka ini buka dulu, baru urus izin. Padahal toko moderen, PKL, reklame, dan sebagainya sudah ada aturannya," ungkapnya.

Heroe menambahkan, ketika toko moderen telah memiliki izin, maka Pemkot akan menjamin operasional mereka. "Kita ingin mengundang siapapun untuk berinvestasi di Yogya. Tapi ikuti aturan yang baik dalam berinvestasi," tegasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005